

Transformasi Peradaban di Dharmasraya: Jejak Hindu-Buddha dan Islam dalam Tinggalan Sejarah Kerajaan Lokal

Yen Leli Hafsoh¹, Rusyda Andini²

Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: 2320060005@uinib.ac.id

Diterima: 18-06-2026 | Disetujui: 23-06-2026 | Diterbitkan: 25-06-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the transformation of civilization in Dharmasraya through historical remains from the Hindu-Buddhist period to Islam, which are still found in various local kingdom sites. This research employs a descriptive qualitative approach with the study location in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. The sites studied include the Amoghapasa Statue in Bukik Barhalo, the Padang Roco Temple Complex, Pulau Sawah Temple, the Pulau Punjung Kingdom, the Koto Besar (Sitiung) Kingdom, and the Padang Laweh Kingdom. Data collection was conducted through direct observation of the physical condition of the sites and semi-structured interviews with local community leaders, site managers, and royal descendants. The data were analyzed using a descriptive qualitative method through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that Dharmasraya is a region that experienced civilizational continuity, marked by strong Hindu-Buddhist influences that later transformed through Islamization without eliminating local cultural systems. In addition, the role of the Batanghari River is an important factor in the development of political, economic, and religious networks within the community. These findings confirm that the transformation of civilization in Dharmasraya took place adaptively through cultural acculturation, producing a layered and continuous historical identity.

Keywords: Dharmasraya; civilization transformation; Hindu-Buddhist; Islam; historical remains.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi peradaban di Dharmasraya melalui tinggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha hingga Islam yang masih dapat ditemukan dalam berbagai situs kerajaan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Situs yang dikaji meliputi Arca Amoghapasa di Bukik Barhalo, Kompleks Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto Besar (Sitiung), dan Kerajaan Padang Laweh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik situs serta wawancara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat, pengelola situs, dan keturunan kerajaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dharmasraya merupakan wilayah yang mengalami kesinambungan peradaban, ditandai oleh kuatnya pengaruh Hindu-Buddha yang kemudian bertransformasi melalui proses islamisasi tanpa menghilangkan sistem budaya lokal. Selain itu, peran Sungai Batanghari menjadi faktor penting dalam perkembangan jaringan politik, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi peradaban di Dharmasraya berlangsung secara adaptif melalui akulturasi budaya yang menghasilkan identitas historis yang berlapis dan berkelanjutan.

Katakunci: Dharmasraya; transformasi peradaban; Hindu-Buddha; Islam; tinggalan sejarah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hafsoh, Y. L., & Andini, R. . (2026). Transformasi Peradaban di Dharmasraya: Jejak Hindu-Buddha dan Islam dalam Tinggalan Sejarah Kerajaan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2159-2170. <https://doi.org/10.63822/kv5f9c61>

PENDAHULUAN

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan sejarah peradaban Melayu di Nusantara. Wilayah ini berada pada jalur penghubung antara Sumatera Barat, Riau, dan Jambi serta dilalui oleh Sungai Batanghari yang sejak masa lampau berperan sebagai jalur perdagangan, transportasi, dan penyebaran budaya (Yondri, 2022). Keberadaan sungai tersebut menjadikan Dharmasraya sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan pusat-pusat kekuasaan di Sumatera bagian tengah (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2018).

Dharmasraya dikenal sebagai salah satu pusat Kerajaan Melayu yang memiliki peranan penting dalam sejarah Sumatera pada masa klasik. Posisi wilayah yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari memungkinkan terjalinnya hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan berbagai kerajaan lain di Nusantara (Munoz, 2016). Salah satu bukti hubungan tersebut adalah keberadaan Arca Amoghapasa yang merupakan hadiah dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari kepada Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa pada tahun 1286 M. Keberadaan arca tersebut menunjukkan pentingnya posisi Dharmasraya dalam jaringan politik dan keagamaan pada masa Hindu-Buddha (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2019).

Jejak peradaban Hindu-Buddha di Dharmasraya masih dapat ditemukan melalui berbagai situs sejarah dan cagar budaya. Arca Amoghapasa di Bukik Barhalo, Kompleks Candi Padang Roco, dan Candi Pulau Sawah merupakan beberapa tinggalan arkeologis yang memperlihatkan eksistensi Kerajaan Melayu Dharmasraya pada masa lampau (Susanto, 2021). Berbagai temuan berupa struktur bata, arca, keramik, dan artefak lainnya memberikan informasi mengenai kehidupan sosial, keagamaan, dan politik masyarakat pada masa tersebut (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2018).

Perkembangan sejarah Dharmasraya tidak berhenti pada masa Hindu-Buddha. Masuknya Islam membawa perubahan dalam sistem sosial, budaya, dan pemerintahan masyarakat setempat. Transformasi tersebut tercermin melalui keberadaan kerajaan-kerajaan lokal bercorak Islam, seperti Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto Besar atau Sitiung, dan Kerajaan Padang Laweh. Berbagai peninggalan yang masih bertahan hingga saat ini, seperti rumah gadang kerajaan, masjid tua, makam tokoh agama, dan tambo kerajaan, menunjukkan adanya kesinambungan sejarah dari masa Hindu-Buddha menuju masa Islam (Wahyuni & Hidayat, 2023).

Kajian mengenai Dharmasraya selama ini umumnya berfokus pada situs-situs tertentu atau peninggalan sejarah tertentu secara terpisah. Padahal, berbagai tinggalan sejarah yang tersebar di wilayah Dharmasraya memperlihatkan adanya proses transformasi peradaban yang berlangsung secara berkelanjutan dari masa Hindu-Buddha menuju masa Islam (Utomo, 2019). Kajian yang mengintegrasikan kedua periode tersebut penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkembangan masyarakat dan kebudayaan di Dharmasraya (Rangkuti, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peradaban di Dharmasraya melalui kajian terhadap berbagai tinggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha dan Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesinambungan dan perubahan budaya yang terjadi dalam perjalanan sejarah Dharmasraya sebagai salah satu pusat peradaban penting di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transformasi peradaban di Dharmasraya melalui tinggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha dan Islam. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 03 – 07 Juni 2026. Lokasi penelitian meliputi situs Arca Amoghapasa di Bukik Barhalo, Kompleks Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto Besar (Sitiung), dan Kerajaan Padang Laweh. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keberadaan berbagai tinggalan sejarah yang merepresentasikan perkembangan peradaban Hindu-Buddha dan Islam di wilayah Dharmasraya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung terhadap situs-situs sejarah dan cagar budaya untuk memperoleh data mengenai kondisi fisik, karakteristik, serta nilai historis tinggalan budaya yang terdapat di setiap lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti mendokumentasikan berbagai temuan yang berkaitan dengan aspek arkeologis, arsitektural, dan budaya sebagai sumber informasi dalam memahami perkembangan sejarah Dharmasraya. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan budaya setempat, seperti tokoh masyarakat, pengelola situs, keturunan kerajaan, dan pihak yang memahami perkembangan sejarah Dharmasraya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang sejarah situs, fungsi budaya, serta keberlanjutan warisan sejarah yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan hasil observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk transformasi peradaban yang tercermin dalam tinggalan sejarah Hindu-Buddha dan Islam di Dharmasraya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan kesinambungan dan perubahan budaya yang terjadi dalam perjalanan sejarah masyarakat Dharmasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jejak Peradaban Hindu-Buddha di Dharmasraya

a. Arca Amoghapasa sebagai Simbol Hubungan Politik Kerajaan Melayu dan Singhasari

Arca Amoghopasa adalah patung Paduka Amoghopasa sebagai salah satu perwujudan Lokeshwara. Patung ini merupakan hadiah dari Kartanegara raja Singhasari kepada Tribhuwanaraja raja Melayu di Dharmasraya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Arca Amoghopasa berukuran tinggi 163 cm, lebar 97–139 cm, dan terbuat dari Batu Andesit (Miksic, 2016). Arca Amoghapasa ditemukan di Bukik Barhalo, Nagari Gunung Salasih, Kecamatan Pulau Punjung, Jorong Lubuk Bulang. Diperkirakan pusat kota Kerajaan Dharmasraya terdapat di Bukik Barhalo tersebut. Penelitian mulai dilakukan pada tahun 2014, 2016, dan 2018. Penelitian pada tahun 2018 (± 2 bulan) dilakukan langsung oleh arkeolog beragama Buddha dan Hindu yang berasal dari Jakarta, Bali, dan Medan (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2020).

Penggalian dilakukan dengan alat sederhana berupa sendok makan kecil seukuran sendok makan umumnya, agar benda yang dicari tidak rusak pada saat penggalian. Proses penggalian juga dibantu warga

setempat. Letak tempat penemuan Arca Amoghapasa yang berada pada dataran lebih tinggi menunjukkan kemungkinan lokasi tersebut memiliki fungsi khusus pada masa lampau. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa area tersebut bukan sekadar pemukiman biasa, melainkan memiliki nilai sakral atau strategis. Diperkirakan demikian karena arah letak tempat temuan arca yang menghadap matahari terbit (Sedyawati, 2018). Dalam konteks kepercayaan Hindu-Buddha, orientasi terhadap matahari sering dikaitkan dengan simbol kesucian, kehidupan, dan pusat kosmologi. Namun setelah diteliti lebih lanjut, Bukik Barhalo merupakan pusat pemukiman penduduk Kerajaan Dharmasraya dengan bukti ditemukannya biji tanaman kuno pada kedalaman ± 2 meter serta pecahan-pecahan piring makan dari masa lampau. Selain itu, ditemukan pula struktur parit memanjang yang diduga berfungsi sebagai benteng pertahanan (Kartodirjo, 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki sistem permukiman yang cukup kompleks dan terorganisir.

Keberadaan Arca Amoghapasa tidak hanya memiliki nilai arkeologis, tetapi juga nilai historis dan politis yang sangat penting. Arca ini merupakan simbol hubungan diplomatik antara Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Melayu Dharmasraya pada abad ke-13. Pemberian arca oleh Raja Kertanegara kepada Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa menunjukkan adanya hubungan politik, keagamaan, sekaligus jaringan kekuasaan yang luas di Nusantara (Utomo, 2019).



Gambar 1. Arca Amoghapasa di Bukik Barhalo

Temuan di kawasan Bukik Barhalo seperti keramik, bata kuno, dan struktur benteng memperkuat dugaan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas penting Kerajaan Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa Dharmasraya tidak hanya berperan sebagai pusat lokal, tetapi juga bagian dari jaringan perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Sumatera dan Asia Tenggara (Miksic & Goh, 2017). Dengan demikian, Arca Amoghapasa dapat dipahami sebagai bukti konkret interaksi politik dan budaya antar kerajaan besar di Nusantara, sekaligus representasi penting dari perkembangan peradaban Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah.

b. Kompleks Candi Padang Roco sebagai Pusat Aktivitas Keagamaan dan Pemerintahan

Kompleks Candi Padang Roco merupakan salah satu situs penting yang berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Situs ini terletak di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung,

dan terdiri atas tiga struktur candi yang tersusun berderet, yaitu Candi Padang Roco I, Candi Padang Roco II, dan Candi Padang Roco III. Ketiga bangunan tersebut dibangun menggunakan bata merah dengan pola susunan tertentu, serta berada pada kawasan dataran yang berdekatan dengan aliran Sungai Batanghari.

Prasasti Padang Roco sendiri ditemukan pada tahun 1911 di hulu Sungai Batanghari, Desa Sungai Lansat, Jorong Sungai Lansat, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan prasasti ini memperkuat posisi kawasan Padang Roco sebagai wilayah penting dalam jaringan politik dan budaya Kerajaan Melayu Dharmasraya (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2018).



Gambar 2. Kompleks Candi Padang Roco

Bangunan Candi Padang Roco berbentuk bata merah yang tersusun rapi dengan pola-pola tertentu, dan pada bagian tengahnya terdapat indikasi ruang yang menunjukkan fungsi tertentu dalam aktivitas ritual maupun sosial. Selain itu, kompleks ini berada di daerah dengan bentang lahan datar, dan area sekitarnya saat ini didominasi oleh perkebunan karet Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2021). Berbagai penelitian arkeologis menemukan adanya struktur parit keliling, pecahan keramik dari berbagai periode, serta sisa bangunan bata di kawasan ini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kawasan Padang Roco tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas sosial dan kemungkinan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Dharmasraya (Yondri, 2022).

Posisi Candi Padang Roco yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari menunjukkan pentingnya sungai sebagai sarana transportasi, perdagangan, dan interaksi budaya pada masa lalu. Sungai Batanghari berperan sebagai jalur utama mobilitas masyarakat yang menghubungkan berbagai pusat permukiman dan kekuasaan di Sumatera bagian tengah, sehingga memperkuat perkembangan peradaban Hindu-Buddha di wilayah ini. Penelitian kepurbakalaan di kawasan DAS Batanghari telah dilakukan sejak abad ke-19 oleh Verkerk Pistorius pada tahun 1860-an, kemudian dilanjutkan oleh Van Stein Callenfels, F.M. Schnitger, hingga Puslitarken dan Balar Medan. Rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa Padang Roco merupakan salah satu titik penting dalam rekonstruksi sejarah Kerajaan Melayu Dharmasraya (Sedyawati, 2019). Dengan demikian, Kompleks Candi Padang Roco dapat dipahami sebagai bukti eksistensi Kerajaan Melayu yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan dan jaringan perdagangan yang berkembang di sepanjang Sungai Batanghari pada masa Hindu-Buddha.

c. Candi Pulau Sawah dan Tradisi Keagamaan Masyarakat Masa Klasik

Candi Pulau Sawah merupakan situs bercorak Buddha yang terletak di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, Sumatera Barat. Situs ini berada di dekat Sungai Batanghari dan secara umum berada pada bentang lahan datar dengan lingkungan sekitar yang didominasi oleh perkebunan karet. Untuk mencapai lokasi, area situs dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari pemukiman terdekat (Rangkuti, 2020). Secara arkeologis, Candi Pulau Sawah terdiri atas sejumlah struktur bata yang tersebar dalam beberapa gundukan tanah (munggu) yang diperkirakan menyimpan sisa-sisa bangunan masa lampau. Pada kawasan ini ditemukan berbagai macam temuan berupa struktur candi, arca, keramik, maupun artefak lainnya yang menunjukkan aktivitas manusia pada masa klasik. Salah satu temuan yang penting adalah adanya lubang persegi di bagian tengah struktur candi yang diperkirakan memiliki fungsi ritual tertentu. Keberadaan struktur ini mengindikasikan bahwa bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai struktur fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik dalam praktik keagamaan masyarakat pada masa itu (Susanto, 2021).



Gambar 3. Candi Pulau Sawah

Temuan-temuan arkeologis tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Dharmasraya pernah menjadi salah satu pusat perkembangan agama Buddha di Sumatera. Selain itu, karakteristik situs Pulau Sawah memiliki kesamaan dengan beberapa kompleks percandian lain di sepanjang Sungai Batanghari, yang menunjukkan adanya jaringan budaya dan keagamaan yang saling terhubung melalui jalur sungai sebagai pusat mobilitas dan interaksi masyarakat pada masa Hindu-Buddha (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2018). Kemudian, keberadaan situs di sepanjang Sungai Batanghari memperkuat dugaan bahwa sungai memiliki peran penting sebagai jalur transportasi, perdagangan, sekaligus penyebaran agama. Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan peradaban masa klasik di Dharmasraya tidak dapat dilepaskan dari peran ekologis dan geografis sungai sebagai pusat kehidupan masyarakat (Suryadi, 2020).

Dalam catatan penelitian arkeologis, Candi Pulau Sawah ditemukan oleh tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas). Secara umum, situs ini juga dikategorikan sebagai area yang memiliki fungsi ritual, termasuk sebagai tempat pemakaman atau pembakaran mayat. Letaknya yang berdekatan dengan Sungai Batanghari memungkinkan praktik pembuangan abu jenazah dilakukan dengan lebih mudah, yang mencerminkan tradisi kematian dalam budaya Hindu-Buddha di Sumatera (Miksic, 2017).

Pada kawasan ini juga ditemukan berbagai temuan penting lainnya, baik berupa candi, arca, keramik, maupun artefak pendukung lainnya. Selanjutnya, pemugaran situs dilakukan pada tahun 2003 oleh SPSP Sumatera Barat–Riau (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2020), yang menunjukkan adanya upaya pelestarian terhadap warisan budaya yang memiliki nilai historis tinggi. Dengan demikian, Candi Pulau Sawah tidak hanya menjadi bukti keberadaan aktivitas keagamaan masyarakat masa klasik, tetapi juga mencerminkan keterhubungan antara ruang sakral, praktik ritual, dan sistem sosial masyarakat yang berkembang di wilayah Dharmasraya pada masa Hindu-Buddha (Wahyuni & Hidayat, 2023).

2. Transformasi Peradaban Islam di Dharmasraya

a. Kerajaan Pulau Punjung dan Keberlanjutan Sistem Adat Minangkabau

Masuknya Islam ke Dharmasraya tidak menghilangkan tradisi lokal yang telah berkembang sebelumnya, melainkan membentuk proses akulturasi budaya yang kuat antara nilai Islam dan adat Minangkabau. Salah satu bukti keberlanjutan tersebut dapat dilihat pada keberadaan Kerajaan Pulau Punjung yang masih mempertahankan sistem adat Minangkabau hingga saat ini (Suryadi, 2020). Kerajaan ini terletak di Lubuk Bulang, Jorong Padang Duri, Nagari Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, lokasi kerajaan berada di pinggir jalan dengan posisi strategis, sementara pada sisi selatan bangunan terdapat Sungai Batanghari yang sejak masa lampau berperan sebagai jalur transportasi dan perdagangan utama di wilayah tersebut (Sedyawati, 2018).



Gambar 4. Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung

Pembangunan Rumah Gadang dilakukan secara gotong royong antara pihak kerajaan dan masyarakat sekitar, yang menunjukkan kuatnya hubungan sosial dalam struktur adat Minangkabau. Kerajaan Pulau Punjung juga merupakan salah satu kerajaan yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung, dengan sistem pemerintahan yang menganut kelarasan Koto Piliang, di mana raja berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur adat (Kartodirjo, 2018).

Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung yang saat ini masih ada dibangun pada tahun 1838 dan hingga kini masih ditempati oleh keturunan atau ahli waris kerajaan. Keberlanjutan hunian ini menunjukkan bahwa fungsi bangunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga masih memiliki nilai sosial dan budaya yang aktif dalam kehidupan masyarakat (Susanto, 2021). Struktur Rumah Gadang ini mencerminkan sistem

sosial Minangkabau yang hierarkis. Pembagian ruang dan tingkatan lantai menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam tata pemerintahan tradisional. Hal ini menjadi representasi nyata dari sistem Koto Piliang yang menekankan keteraturan, kepemimpinan terpusat, dan pembagian peran sosial dalam masyarakat adat.

Keberadaan Kerajaan Pulau Punjung menunjukkan bahwa proses islamisasi di wilayah Dharmasraya berlangsung secara damai melalui akulturasi budaya, bukan penghapusan tradisi lokal. Nilai-nilai Islam diterima dan berintegrasi dengan sistem adat yang telah ada sebelumnya, sehingga membentuk identitas sosial masyarakat yang khas, yaitu perpaduan antara adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam yang dikenal dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Dengan demikian, Kerajaan Pulau Punjung tidak hanya menjadi bukti keberlanjutan institusi tradisional Minangkabau, tetapi juga mencerminkan dinamika historis transformasi sosial-budaya di Dharmasraya yang tetap mempertahankan kesinambungan antara masa pra-Islam dan masa Islam (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2019).

b. Kerajaan Koto Besar (Sitiung) sebagai Pusat Penyebaran Islam

Perkembangan Islam di Dharmasraya tercermin melalui keberadaan Masjid Tua Al-Jami' yang menjadi bagian dari kawasan Kerajaan Koto Besar atau Sitiung. Kawasan ini menunjukkan bahwa proses islamisasi di wilayah Dharmasraya tidak hanya berlangsung secara struktural, tetapi juga melalui pembentukan pusat-pusat pendidikan dan aktivitas keagamaan yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat lokal (Wahyuni & Hidayat, 2023).



Gambar 5. Masjid Tua Al-Jami' Sitiung

Masjid ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama. Berdasarkan keterangan narasumber, kawasan masjid pernah menjadi tempat persinggahan para ulama dan santri yang melakukan perjalanan melalui Sungai Batanghari. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Sungai Batanghari tidak hanya berperan sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai media utama penyebaran Islam dan mobilitas intelektual keagamaan di Sumatera bagian tengah (Rangkuti, 2020). Secara geografis, Masjid Tua Al-Jami' terletak di kawasan yang menghadap Sungai Batanghari, yang secara simbolik maupun praktis menunjukkan keterkaitan erat antara ruang sakral dan jalur transportasi utama masyarakat pada masa itu. Di kawasan ini juga terdapat dua surau kecil, yaitu Komang dan Kojik, yang digunakan sebagai tempat mengaji bagi anak-anak santri dan masyarakat sekitar (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2019).

Masuknya Islam di Sitiung diperkirakan berlangsung sejak abad ke-16 hingga ke-17 M melalui peran para ulama lokal yang menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan pendidikan, dakwah, dan interaksi sosial masyarakat (Suryadi, 2020). Proses ini menunjukkan bahwa islamisasi di wilayah ini tidak bersifat koersif, melainkan berlangsung secara damai dan adaptif terhadap struktur budaya yang telah ada sebelumnya (Wahyuni & Hidayat, 2023). Keberadaan Masjid Tua Al-Jami' juga memperlihatkan bahwa institusi keagamaan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran, pembinaan moral, dan ruang interaksi sosial yang memperkuat jaringan keagamaan di wilayah Sitiung. Dengan demikian, Kerajaan Koto Besar (Sitiung) dapat dipahami sebagai salah satu pusat penting dalam jaringan penyebaran Islam di Dharmasraya, di mana Sungai Batanghari berperan sebagai jalur utama yang menghubungkan aktivitas perdagangan, mobilitas ulama, dan proses islamisasi masyarakat secara lebih luas.

c. Kerajaan Padang Laweh dan Pelestarian Identitas Budaya

Kerajaan Padang Laweh merupakan salah satu kerajaan lokal di Dharmasraya yang masih mempertahankan berbagai tinggalan budaya hingga saat ini. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan bahwa proses perkembangan masyarakat di Dharmasraya tidak sepenuhnya menghilangkan struktur budaya lama, melainkan tetap menjaga kesinambungan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi (Wahyuni & Hidayat, 2023). Kerajaan ini terletak di Kampung Padang Laweh, Jorong Padang Laweh, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, bangunan kerajaan berada di antara bangunan baru milik ahli waris kerajaan dengan bentang lahan datar. Pada sisi barat kawasan ini terdapat Sungai Batanghari yang sejak masa lampau berperan sebagai jalur utama transportasi, perdagangan, dan interaksi budaya masyarakat (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2020).



Gambar 6. Rumah Gadang Kerajaan Padang Laweh

Bangunan Rumah Gadang Kerajaan Padang Laweh yang masih berdiri hingga saat ini menjadi bukti keberlanjutan sistem adat Minangkabau lama. Rumah Gadang tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 1213 dan hingga kini masih mempertahankan struktur adat yang diwariskan secara turun-temurun

(Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2020). Keberadaan bangunan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara masa lalu dan masa kini dalam sistem sosial masyarakat setempat. Selain bangunan fisik, terdapat pula berbagai sumber sejarah penting seperti tambo yang ditulis menggunakan aksara Arab-Melayu. Keberadaan tambo tersebut menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam tradisi literasi masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai media pewarisan sejarah dan identitas budaya antargenerasi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Padang Laweh telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem budaya lokal tanpa menghilangkan struktur tradisi yang telah ada sebelumnya (Rangkuti, 2020).

Pelestarian bangunan, tambo, dan tradisi adat di Kerajaan Padang Laweh menunjukkan bahwa transformasi peradaban di Dharmasraya tidak berlangsung melalui penggantian budaya secara total, melainkan melalui proses adaptasi dan integrasi antara unsur-unsur lama dan baru (Munoz, 2016). Proses ini mencerminkan pola keberlanjutan budaya yang menjadi ciri khas perkembangan masyarakat Minangkabau di wilayah Dharmasraya (Utomo, 2019). Dengan demikian, Kerajaan Padang Laweh tidak hanya berfungsi sebagai situs sejarah, tetapi juga sebagai representasi nyata dari pelestarian identitas budaya yang tetap hidup di tengah perubahan zaman, sekaligus memperlihatkan hubungan harmonis antara adat, agama, dan struktur sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi lapangan pada situs-situs peninggalan sejarah di Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa kawasan ini memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban di Sumatera bagian tengah, khususnya pada masa Hindu-Buddha hingga periode Islam. Temuan Arca Amoghapasa, Kompleks Candi Padang Roco, dan Candi Pulau Sawah menunjukkan bahwa Dharmasraya pernah menjadi pusat aktivitas politik, keagamaan, dan budaya yang terintegrasi dalam jaringan kekuasaan regional Nusantara. Keberadaan arca, prasasti, struktur bata, serta artefak pendukung lainnya memperkuat bukti bahwa wilayah ini memiliki tingkat kompleksitas sosial dan sistem pemerintahan yang berkembang. Selain itu, keberadaan Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto Besar (Sitiung), dan Kerajaan Padang Laweh menunjukkan bahwa setelah masa Hindu-Buddha, Dharmasraya tidak mengalami disrupsi budaya secara total, melainkan mengalami proses transformasi sosial melalui akulturasi. Sistem adat Minangkabau tetap bertahan dan beradaptasi dengan masuknya Islam, yang tercermin dalam struktur rumah gadang, sistem kelurahan Koto Piliang, serta tradisi literasi Arab-Melayu melalui tambo. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan budaya yang kuat dalam masyarakat lokal.

Peran Sungai Batanghari sebagai jalur utama transportasi dan interaksi sosial menjadi faktor penting dalam perkembangan seluruh situs yang diteliti. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai media penyebaran agama, mobilitas penduduk, serta penghubung antar pusat kekuasaan di kawasan Sumatera bagian tengah. Pola persebaran situs di sepanjang DAS Batanghari memperlihatkan bahwa perkembangan peradaban Dharmasraya sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dharmasraya merupakan wilayah yang memiliki kontinuitas sejarah panjang, ditandai oleh keterhubungan antara masa Hindu-Buddha dan masa Islam melalui proses adaptasi budaya. Keberadaan situs-situs tersebut tidak hanya menjadi bukti arkeologis, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya masyarakat yang terbentuk melalui interaksi antara kekuasaan politik, agama, dan lingkungan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. (2018). *Data pemutakhiran cagar budaya Kabupaten Dharmasraya tahun 2018*. BPCB Sumatera Barat.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. (2020). *Laporan penelitian situs Dharmasraya*. BPCB Sumbar.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. (2021). *Inventarisasi cagar budaya Sumatera Barat*. BPCB Sumbar.
- Kartodirdjo, S. (2018). *Sejarah sosial Indonesia: Tradisi dan modernisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Miksic, J. (2016). *Ancient history of Sumatra*. Singapore: NUS Press.
- Miksic, J. (2017). *Archaeology of early Southeast Asia*. NUS Press.
- Munoz, P. M. (2016). *Early kingdoms of the Indonesian archipelago and the Malay Peninsula*. Didier Millet.
- Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. (2019). *Laporan penelitian kawasan percandian Dharmasraya*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rangkuti, N. (2020). *Jejak peradaban Melayu di kawasan Dharmasraya*. Purbawidya, 9(2), 101–114.
- Sedyawati, E. (2018). *Arkeologi Indonesia: Kajian budaya masa lampau*. Jakarta: Gramedia.
- Suryadi, S. (2020). *Islamisasi Minangkabau: Sejarah dan perkembangan awal*. Padang: Andalas University Press.
- Susanto, N. N. (2021). *Cultural heritage and historical identity in Dharmasraya Regency*. Humaniora, 33(3), 245–257.
- Utomo, B. B. (2019). *Dharmasraya dalam jaringan perdagangan dan kekuasaan Melayu abad XIII–XIV*. Berkala Arkeologi, 39(1), 15–29.
- Wahyuni, S., & Hidayat, T. (2023). *Islamic heritage and local kingdoms in West Sumatra: Historical continuity and cultural transformation*. Heritage of Nusantara, 12(1), 45–61.
- Yondri, L. (2022). *Kajian arkeologi situs Hindu-Buddha di sepanjang DAS Batanghari*. Kapata Arkeologi, 18(2), 131–146.